

## ABSTRACT

The state of provincial KPUs throughout Indonesia shows a marked imbalance between one another. That can be seen from the responsibility of dependents as an Electoral Management Body (EMB) that involves the number of districts, constituencies, and polling stations. Such inequality was barely realized by the parties because it involved a mental-blocking paradigm, that the provincial region's administrative basis for the sub-national KPU was considered non-negotiable.

This study is the first to address inequalities in the coverage of sub-national KPU work areas. Here, using the analytical hierarchy process approach, an analytical-descriptive method is employed to evaluate the EMB dependency criterias. The results of a demanding reconstruction, namely the subnational EMB called the "Regional KPU," were found to be comparatively balanced in terms of the load from the simulation modeling. Simulations were carried out for Java, Madura, and Bali, which already covered more than half the population. The DKI Jakarta Region, which is a special area carrying also the electoral district abroad, is excepted. The reconstruction solved the EMB inequality problem with promising results and implications that lost nothing; even dismantling the constraints of the counter-productive spatial paradigm for public policy.

*Keywords: clustering EMB, state auxiliary, inter-institutions inequality*

## ABSTRAK

Kondisi KPU provinsi di seluruh Indonesia menunjukkan ketimpangan yang nyata satu sama lain. Hal itu kelihatan ditilik dari beban muatan sebagai *electoral management body* (EMB), yakni antara lain jumlah kabupaten/kota, daerah pemilihan dan tempat pemungutan suara yang tidak merata di antara provinsi-provinsi yang ada. Ketimpangan demikian itu nyaris tidak disadari oleh para pihak karena menyangkut semacam bloking mental yang bersifat paradigmatik, yang menganggap bahwa basis administrasi wilayah provinsi bagi KPU sub-nasional merupakan hal yang tidak bisa ditawar.

Kajian ini merupakan yang pertama mempersoalkan ketimpangan cakupan wilayah kerja KPU sub-nasional, dengan menawarkan model yang lebih adil. Di sini dipergunakan metode analitis-deskriptif dengan memanfaatkan pendekatan AHP (*analytical hierarchy process*) untuk mengolah kriteria beban EMB tiap unit sub-nasional. Dari simulasi diperoleh hasil rekonstruksi yang menantang, yakni EMB sub-nasional baru yang disebut “KPU Regional”, yang secara komparatif satu sama lain keadaannya setara ditilik dari beban muatannya. Simulasi dilaksanakan untuk Jawa, Madura, Bali, yang sudah meliputi lebih separuh jumlah penduduk. Dalam hal ini wilayah DKI Jakarta tidak disertakan dalam simulasi; mengingat DKI merupakan wilayah khusus yang juga menanggung daerah pemilihan Luar Negeri.

Rekonstruksi ini menuntaskan masalah ketimpangan KPU Provinsi dengan hasil yang menjanjikan, dengan implikasi yang tidak mengorbankan apapun; bahkan menghilangkan kendala paradigma spasial yang kontra-produktif bagi kebijakan publik.

***Kata kunci:*** rekonstruksi wilayah, KPU, ketimpangan antar-lembaga

## DEDIKASI

Dipersembahkan dengan cinta dan kasih-sayang untuk *Komunitas Belajar nDalem Ontosenan*, Yogyakarta.



*Kakungku pangeling-eling mring Rama, Biyung & Pakdhe,  
Kajalah mujiya dados pratanda lektos kawula mring Negari sak kukuban*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah rabbil alamin.*

Diucapkan terimakasih kepada banyak pihak, yang memungkinkan diselesaikannya tesis ini:

- Dosen Pembimbing, **DR Suranto, M.Pol.**, yang telah memberi masukan-masukan konstruktif sejak awal tesis ini dipersiapkan;
- Pimpinan Program Studi: Bu **DR. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si.**, Bu **DR. Dyah Mutiarin, M.Si.**, Pak **DR. Suswanto, M.Si.**, yang semenjak awal proses telah ikut menyemangati — Pak Sus yang dengan gaya lembutnya memberi masukan penting;
- Para Tokoh Kampus: Pak **Prof. DR. Achmad Nurmandi, M.Sc.** yang dengan caranya sendiri di ‘pinggiran’ namun telah ikut memacu ‘orang-orang unik’ ini; dan **DR Phil. Ridho Alhamdi, MA**, ‘junior’ Penulis tetapi terus saja menjadi ‘senior’ yang membesarkan hati;

Tesis ini terselesaikan karena juga pertolongan banyak pihak. Mungkin tidak semua orang akan menganggap apa yang dilakukannya penting bagi Penulis. Sebaliknya, Penulis juga berkemungkinan menyikapi sumbangsih seseorang yang penting, langsung atau tak langsung, dengan menganggapnya biasa-biasa saja — mohon maaf untuk kekhilafan ini.

Untunglah, Allah melalui para malaikat-Nya, tidak akan khilaf senoktah pun mencatat semua hal-ihwal. Karena itu Penulis langsung bermunajat kepada Ilahi Rabbi, mohon agar sumbangsih semua pihak dicatat dan diimbali berkah dari Sang Maha Pengasih, lantaran ucapan terimakasih di lembaran ini sangatlah tidak memadai.

Semoga Allah memuliakan mereka semua, dengan cara yang mungkin tidak mereka sangka-sangka.

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	
NOTA DINAS - PENGESAHAN	
ABSTRAK	vii
DEDIKASI	ix
UNGKAPAN TERIMAKASIH	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR BAGAN/GAMBAR/GRAFIK	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.3.1. Tujuan Penelitian	10
1.3.2. Manfaat Penelitian	11
1.3.2.1. Manfaat Teoritis	11
1.3.2.2. Manfaat Praktis	12
1.3.2.3. Manfaat Paradigmatis	12
1.3. Capaian dan Tinjauan Tesis	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pendahuluan	15
2.2. Sistem Pemilu	18
2.3. Partisipasi dan Protest Voters	20
2.4. Electoral Management Bodies (EMB/KPU) Era Informasi	24

2.5. Wilayah Kerja KPU dan Paradigma Keruangan	25
2.6. Landasan Teori: Demokrasi dan Pemilu	29
2.7. Kerangka <i>Good Governance</i> dalam Penyelenggaraan Pemilu	39

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1. Metode Penelitian	45
3.2. Desain Penelitian	45
3.3. Wilayah Penelitian	49
3.4. Jenis dan Sumber Data	49
3.5. Unit Analisis	50
3.6. Teknik Analisis Data	50

### **BAB IV PEMBAHASAN**

4.1. Pendahuluan	52
4.2. Ketimpangan Antar-KPU Provinsi	53
4.3. Model Restrukturisasi KPU Provinsi	57
4.4. Implementasi Rekonstruksi	60
4.4.1. Langkah Metodis AHP	60
4.4.2. Prinsip-Prinsip Rekonstruksi	67
4.4.3. Penentuan dan Pembobotan Kriteria	70
4.4.4. Menghitung Konsistensi Hirarki	75
4.5. Simulasi dan Penghitungan Beban Tiap EMB	77

### **BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan	88
5.2. Rekomendasi	89

<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	90
-----------------------	----

<b>LAMPIRAN</b>	95
-----------------	----

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	96
-----------------------------	----

## DAFTAR BAGAN/ GAMBAR/ /GRAFIK

Bagan 2.1. Peta Literatur Kepemiluan	17
Bagan 2.2. Relasi Sebelum dan Sesudah Rekonstruksi	44
Bagan 3.1. Level Operasi AHP	47
Bagan 4.1. Angka Optimal Tiap Kriteria	73
Gambar 4.1. Skematik Kondisi KPU Sub-Nasional	59
Gambar 4.2. Langkah Metodis AHP I	62
Gambar 4.3. Langkah Metodis AHP II	63
Gambar 4.4. Struktur Hirarki AHP	64
Gambar 4.5. Peta Dapil DPR untuk Jawa-Madura-Bali	78
Grafik 4.1. Perbandingan Jumlah Kabupaten/Kota Tiap Provinsi	54
Grafik 4.2. Perbandingan Luas Wilayah Provinsi	55
Grafik 4.3. Perbandingan Jumlah Pemilih Tiap Provinsi	56
Grafik 4.4. Hasil Rekonstruksi untuk Jawa, Bali, Madura	82
Grafik 4.5. Perbandingan Cakupan Jumlah TPS	83
Grafik 4.6. Perbandingan Antar-Regional untuk Tiga Kriteria	85
Grafik 4.7. Perbandingan Beban Relatif Tiap KPU Regional	86

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Terpilih	3
Tabel 1.2. Perbandingan Luas Wilayah Provinsi	4
Tabel 1.3. Perbandingan Tiga Kategori Provinsi	6
Tabel 3.1. Skala Dasar Perbandingan Kriteria	48
Tabel 3.2. Matriks Nilai Kriteria	48
Tabel 4.1. Matriks Rezim Pemilu	53
Tabel 4.2. Matriks Perbandingan Berpasangan	65
Tabel 4.3. Prinsip Rekonstruksi	66
Tabel 4.4. Rasio Bobot Penilaian terhadap Ketiga Kriteria	71
Tabel 4.5. Skala Dasar Pembandingan Kriteria	72
Tabel 4.6. Bobot-Proporsi dari Ketiga Kriteria	73
Tabel 4.7. Rumus Bobot Antar-Kriteria	74
Tabel 4.9. Rerata Normalisasi Bobot Antar-Kriteria	75
Tabel 4.10. Nilai Random Consistency (RC)	76
Tabel 4.11. Implementasi Rekonstruksi	79
Tabel 4.12. Skenario KPU Sub-Nasional Jawa-Bali-Madura	80
Tabel 4.13. Rasio Kriteria	84



